



Judul : Revisi UU Kepariwisata sebagai Keharusan Adaptasi
Tanggal : Kamis, 19 Januari 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 12

SEKILAS

Revisi UU Kepariwisata sebagai Keharusan Adaptasi

DALAM kurun waktu 13 tahun, Undang-Undang Kepariwisata masih dianggap belum optimal mencapai tujuannya, begitu pun implementasinya yang belum efektif. Komisi X DPR memandang perlu merevisi UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata tersebut.

Pakar pariwisata berkelanjutan Universitas Pelita Harapan (UPH) Diena Mutiara Lemy setuju adanya revisi UU Kepariwisata tersebut karena dinamika pariwisata sendiri sudah berkembang luar biasa. "Setelah pandemi covid-19 sudah sangat berubah dinamika dunia kepariwisataan. Jadi, ini adalah momentum yang baik ketika UU Kepariwisata hendak direvisi," ucap Diena di Jakarta, kemarin.

Ia memaparkan ada berbagai isu strategis yang sangat berpengaruh terhadap kepariwisataan, salah satunya perubahan iklim. "Karena adanya isu strategis itu, kami dari kalangan pariwisata menyadari bahwa sekarang pariwisata berkelanjutan bukan lagi satu pilihan, melainkan adalah sesuatu keharusan untuk dilakukan dan diterapkan," tegasnya.

Indonesia punya potensi yang luar biasa, tapi kenyataannya kalah dengan Thailand. "Barangkali inilah saatnya memikirkan yang potensi-potensi itu benar-benar bisa menjadi aktual," tambah Diena. (Fal/H-1)